

TANGGAPAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS ATAS FASILITAS PUBLIK YANG DIBERIKAN KOTA LAMONGAN

Ach Zulfikar Widiyanto

16040254092 (PPKn, FISH, UNESA) ach.zulfikarwidiyanto16040254092@mhs.unesa.ac.id

Warsono

00019056003(PPKn, FISH, UNESA) warsono@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang telah diberikan kota Lamongan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif deskriptif dengan persentase. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 69 orang penyandang disabilitas yang terbagi menjadi 24 orang penyandang tunadaksa, 16 orang penyandang tunanetra, 11 orang penyandang tunawicara dan 18 orang penyandang cacat ganda. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang telah diberikan kota Lamongan yaitu 87,5% penyandang tunadaksa mengatakan puas dan 12,5% mengatakan tidak puas, kemudian 56,25% penyandang tunanetra mengatakan tidak puas dan 43,75% mengatakan puas, serta 68,96% penyandang tunawicara dan cacat ganda mengatakan puas dan 31,03% mengatakan tidak puas.

Kata Kunci: Tanggapan, Disabilitas, Fasilitas publik.

Abstract

The purpose of this research is to describe the responses of people with disabilities for public facilities that have been given the city of Lamongan. This study uses a type of descriptive quantitative approach with percentage. The number of samples in this study was 69 people with disabilities that are divided into 24 people with disabilities, 16 people with visual impairment, 11 people with no means and 18 persons with double disability. Data collection techniques using observations and polls. The Data obtained is then analyzed using a descriptive quantitative technique with a percentage. The results of this study showed that the responses of people with disabilities for public facilities that have been given the city of Lamongan which is 87.5% the disabled say satisfied and 12.5% say dissatisfied, then 56.25% of the visually impaired said dissatisfied and 43.75% said satisfied, as well as 68.96% people who have been able and double defects say satisfied and 31.03% say not satisfied.

Keywords: response, disability, public facilities.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang sama, kesempatan yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak terkecuali bagi masyarakat yang memiliki kekurangan secara fisik dan non-fisik, yang biasa disebut dengan masyarakat disabilitas. Menurut Marwandianto (2018:176) para penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Para penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama seperti masyarakat normal yang lainnya, dimana hak-hak mereka meliputi aksesibilitas, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan dan bantuan sosial harus terpenuhi dan diberikan oleh pemerintah.

Pemerintah menjadi sebuah lembaga-lembaga wakil rakyat yang memiliki kewajiban memberikan hak-hak kepada masyarakat salah satunya yakni dengan

memberikan pelayanan. Menurut Rita (2016:175) tugas pemerintah pada hakekatnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat memiliki berbagai macam bentuk salah satu contohnya yakni pelayanan publik baik secara fisik dan non-fisik. Pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Raminto (2006) pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik berupa barang atau jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta

dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Dalam konsep pelayanan terdapat dua jenis pelaku pelayanan, yaitu yang pertama penyedia pelayanan dan yang kedua penerima pelayanan. Menurut Barata (2003) dalam Sugi Rahayu (2014) penyedia pelayanan adalah pihak yang dapat memberikan pelayanan kepada konsumen dalam bentuk penyediaan atau penyerahan barang atau jasa. Sedangkan penerima pelayanan adalah konsumen yang menerima layanan dari para penyedia pelayanan. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam pelayanan publik harus memenuhi beberapa asas-asas seperti asas kepastian hukum, kepentingan umum, persamaan hak, persamaan perlakuan atau tidak diskriminasi, perlakuan khusus bagi kelompok rentan, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. Maka, apabila merujuk pada Undang-undang tersebut tentu pelayanan publik harus memperhatikan kesamaan hak dan kemudahan bagi masyarakat disabilitas yang termasuk dalam golongan kelompok rentan selain anak-anak dan wanita.

Sudah jelas bahwa pelayanan publik yang dibangun dan diberikan pemerintah kepada masyarakat bukan hanya diperuntukan bagi masyarakat normal melainkan juga bagi masyarakat disabilitas. Menurut Coleridge dalam Pujianti (2018:12) difabel merupakan kepanjangan dari *Differently Abled People* yang berarti orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda. Kemudian, menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1 tentang penyandang cacat, yang dimaksud penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan secara fisik atau mental yang dapat mengganggu serta menjadi rintangan dan hambatan baginya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental (ganda).

Para penyandang disabilitas memiliki beberapa perbedaan dengan masyarakat normal yang lainnya, menurut Pricsyllia (2016:105) para penyandang disabilitas dalam mobilitasnya secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Oleh karena itu, para penyandang disabilitas membutuhkan dukungan sosial meliputi dukungan berupa bantuan nyata, dukungan dalam penghargaan, dukungan diri sendiri, dan dukungan untuk menjadi bagian dari kelompok (Cohen,1985:95).

Pemerintah sebagai lembaga penyedia pelayanan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat disabilitas perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana atau fasilitas publik yang berbeda dengan dengan masyarakat normal. Fasilitas publik menjadi aspek penunjang untuk lebih memudahkan dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena

itu, fasilitas publik menjadi aspek yang sangat penting bagi masyarakat penyandang disabilitas, karena dengan adanya fasilitas publik yang disediakan bagi para penyandang disabilitas tentu sangat membantu mereka dalam menerima pelayanan serta dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari bagi mereka.

Hal tersebut juga sudah diatur dalam undang-undang yang mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pada bangunan umum, jalanan, pertamanan, pemakaman, pemukiman, transportasi umum, dan sebagainya yang mudah diakses, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat disabilitas. Kewajiban pemerintah tersebut tertuang pada pasal 97-107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Kewajiban pemerintah dalam memberikan kemudahan atau aksesibilitas pada fasilitas publik bagi masyarakat disabilitas juga sudah diatur dengan tegas melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat tertuang pada pasal 10. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, didalamnya terdapat pasal yang mengatakan pemerintah wajib untuk memberikan aksesibilitas pada sarana dan prasarana bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Hal tersebut tertuang pada pasal 8 yang berbunyi setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas. Berpijak pada peraturan pemerintah tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa semua fasilitas publik penunjang pelayanan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau penyedia pelayanan yang lain harus memberikan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Upaya perlindungan kedudukan bagi para penyandang disabilitas melalui sarana dan prasarana harus terus diberikan kepada para penyandang disabilitas karena para penyandang disabilitas tersebut memiliki persamaan kedudukan dan persamaan hak seperti masyarakat normal yang lainnya serta sudah diatur dengan jelas dan tegas pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada bahwa pemerintah wajib memberikan sarana dan prasarana yang mudah diakses, digunakan dan dimanfaatkan bagi para penyandang disabilitas.

Berdasarkan data statistik badan kesehatan dunia (WHO) dalam Syafi'ie (2014) mengatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia sebesar 15% dari seluruh total populasi penduduk di dunia. Sedangkan, berdasarkan survey penduduk antar sensus (SUPAS) oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yaitu 21,5 juta jiwa.

Dari survey yang telah dilakukan oleh badan pusat statistic (BPS) juga dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terus bertambah.

Tabel 1 Data penyandang disabilitas di Lamongan tahun 2018

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Cacat Tubuh	427
2	Tunanetra	111
3	Tunawicara	57
4	Cacat Mental	158
5	Cacat Ganda	137
6	Penderita Penyakit Kronis	9
	Jumlah	899

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Berdasarkan table 1 digambarkan jumlah penyandang disabilitas di Lamongan pada tahun 2018 berjumlah 899 orang dengan rincian sebagai berikut: penyandang cacat tubuh 427 orang, penyandang tunanetra 111 orang, penyandang tunawicara 57 orang penyandang cacat ganda 137 orang, dan penderita penyakit kronis 9 orang. Semangat pelayanan sudah sepatutnya tidak dipengaruhi besar kecilnya pengguna layanan.. dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, untuk itu pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para difabel, termasuk dalam hal memberikan aksesibilitas sarana dan prasarana dalam pelayanan publik.

Kabupaten Lamongan adalah salah satu Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Lamongan memiliki pusat pemerintahan yang berada pada 50km sebelah barat kota Surabaya yang menjadi ibu kota provinsi jawa timur. Oleh karena itu kabupaten Lamongan menjadi salah satu wilayah yang berada dalam kawasan metropolitan kota Surabaya, yakni gerbang kertosusila. Meskipun memiliki luas wilayah yang tidak cukup luas dibandingkan dengan kota-kota lain, kabupaten Lamongan tidak melupakan kewajiban dalam memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada masyarakatnya, salah satunya yakni memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus atau masyarakat disabilitas.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh, pemerintah Lamongan telah banyak melakukan perbaikan dan penambahan pembangunan fasilitas-fasilitas publik baik untuk masyarakat normal maupun masyarakat disabilitas. Perbaikan dan pembangunan fasilitas fasilitas publik bagi masyarakat disabilitas tersebut meliputi

penyediaan jalan pedestrian dengan lantai pemandu bagi masyarakat disabilitas tunanetra, penyediaan ruang tunggu dan parkir khusus bagi masyarakat disabilitas, perbaikan peningkatan aksesibilitas fasilitas pada puskesmas dan rumah sakit, aksesibilitas pada transportasi umum, aksesibilitas pada taman kota dan toilet umum.

Hal tersebut menunjukkan wujud kepedulian pemerintah Lamongan terhadap masyarakat penyandang disabilitas dengan menyediakan beberapa fasilitas yang diperuntukan bagi masyarakat disabilitas agar dapat membantu mereka dalam menerima pelayanan dari pemerintah dan dapat membantu mereka dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Namun, belum adanya ukuran atau acuan yang dapat dipakai untuk mengukur kesuksesan pemerintah Lamongan dalam membangun dan menyediakan fasilitas publik yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan para masyarakat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin melihat respons atau tanggapan masyarakat penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan dan disediakan kepada mereka sebagai ukuran kepedulian dan kesuksesan pemerintah dalam memberikan hak-hak yang harus diberikan dan didapatkan bagi masyarakat disabilitas yang sudah diatur dalam undang-undang. Dari penjelasan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang diberikan kota Lamongan.

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 1 ayat 1 penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, intelektual, dan/ sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan serta kesulitan. Menurut Rahayu.S.,dkk (2013:111) terdapat empat asas yang menjamin kemudahan atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang harus dipenuhi yaitu asas kemudahan, asas bangunan, asas keselamatan, dan asas kemandirian.

Kemudian menurut Sinabella (2007:5) mendefinisikan pelayanan umum adalah kegiatan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara. Menurut Tjiptono dalam Puspitasari (2016:92) hubungan kualitas pelayanan sangat erat dengan kepuasan penerima pelayanan. Sedangkan terdapat empat unsur penting yang ada pada proses pelayanan publik menurut Bharata (2003:11) yaitu penyedia pelayanan, penerima pelayanan, jenis pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya menurut Kasmir (2006:34) mengemukakan ciri-ciri pelayanan publik yang baik yaitu memiliki unsur-unsur yaitu adanya sarana dan prasarana serta karyawan yang baik, bertanggung jawab terhadap pelanggan, mampu melayani dengan cepat dan

tepat, mampu berkomunikasi, menjamin kerahasiaan transaksi, memahami kebutuhan pelanggan, dan memberikan kepercayaan terhadap nasabah.

Sedangkan fasilitas publik menurut Moenir dalam Purwaningsih (2015:18) adalah segala jenis peralatan kerja, perlengkapan kerja, dan pelayanan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat pembantu dalam melaksanakan pekerjaan atau segala sesuatu yang digunakan, dinikmati, dan ditempati oleh pengguna.

Penelitian ini menggunakan teori tugas pemerintah menurut Rasyid (2000) dalam Suprianto (2014:13). Dimana dalam teori tersebut terdapat tujuh (7) tugas pemerintah yang salah satunya pemerintah memiliki tugas berkewajiban melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya masyarakat penyandang disabilitas. Kemudian teori tersebut diperkuat pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Sosial Penyandang Cacat, dimana pemerintah juga wajib memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap pengadaan sarana dan prasarana umum. Teori ini digunakan untuk menganalisis topik pembahasan dalam penelitian yaitu, tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang telah mereka dapatkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:8) metode kuantitatif adalah metode dalam penelitian yang didasarkan pada filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti populasi serta sampel tertentu dengan pengambilan sampel secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data menggunakan kuantitatif/statistik. Penelitian yang bersifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terhadap suatu keadaan gejala, individu, atau kelompok tertentu dengan secermat mungkin (Masyhuri, 2008:34).

Penelitian ini berlokasi di wilayah Lamongan terkhusus pada masyarakat disabilitas. Menurut Sugiyono (2016:117) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek dan objek yang menjadi kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 228 orang dari empat (4) jenis penyandang cacat. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dan *simple random sampling*, kemudian setelah dihitung menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan 0,1 maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 69 yang terbagi

dari 24 orang penyandang cacat tubuh, 16 orang penyandang tunanetra, 11 orang penyandang tunawicara dan 18 orang penyandang cacat ganda.

Dalam pengumpulan data, menggunakan teknik observasi dan angket. Observasi digunakan untuk melihat permasalahan awal di lapangan serta dapat digunakan untuk mentriangulasi data kemudian angket untuk mengumpulkan data tentang tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang telah diberikan kota Lamongan. Kuisisioner dalam penelitian ini bersifat tertutup dan skala yang digunakan dalam kuisisioner penelitian ini menggunakan skala *Guttman*. Penelitian ini menggunakan tiga (3) instrument dengan tiga (3) indikator yang berbeda. Dari ketiga instrument tersebut akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan persentase. Teknik tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap fasilitas publik yang telah diterima dari masing-masing jenis masyarakat penyandang cacat di Lamongan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = hasil akhir dalam persentase

n = nilai yang diperoleh dalam angket

N = jumlah responden

Data yang diperoleh melalui angket perlu dikuantitatifkan terlebih dahulu, dengan menentukan skor pada angket dan setiap nomor terdiri dari dua pilihan jawaban dengan skor yang berbeda pada setiap pilihan jawaban yakni pilihan jawaban Ya skor 1 dan pilihan jawaban Tidak skor 0. Setelah memperoleh hasil akhir berupa skor, selanjutnya dilakukan kriteria penilaian. Analisis kriteria penilaian dilakukan dengan rumus interval sebagai berikut:

$$i = \frac{(X_i - X_r) + 1}{K_i}$$

Keterangan :

i : Interval

X_i : Nilai tertinggi

X_r : Nilai Terendah

K_i : Kelas Interval

Tahap selanjutnya yaitu menganalisis skor pada tiap-tiap indikator. Pada penelitian ini terdapat tiga (3) indikator yang melalui tahap analisis dan akan dicari rata-rata skornya. Dengan adanya data tersebut akan diketahui berapa rata-rata skor tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang telah diberikan kota

Lamongan, apakah termasuk dalam kategori puas dan tidak puas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan Masyarakat Penyandang Disabilitas Tunadaksa Atas Fasilitas Publik Yang Diberikan Kota Lamongan.

Indikator pertama dalam penelitian ini memiliki peranan yang penting karena digunakan untuk mengukur tanggapan masyarakat penyandang disabilitas khususnya pada indikator ini yaitu masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa. Menurut Argyo (2005:10) penyandang disabilitas tunadaksa atau cacat fisik adalah suatu kecacatan yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada fungsi tubuh yang meliputi cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, dan cacat leher. Sedangkan menurut Hurlock dalam Alfari (2018:202) mengatakan kondisi yang dialami oleh para penyandang cacat atau disabilitas secara fisik menyebabkan kesulitan dalam melakukan segala aktivitas. Sebagai masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa tentu membutuhkan adanya fasilitas dalam membantu mereka menjalankan kehidupan atau aktivitas sehari-hari, fasilitas tersebut antara lain ruang tunggu dan parkir khusus, aksesibilitas pada bangunan dan jalan umum.

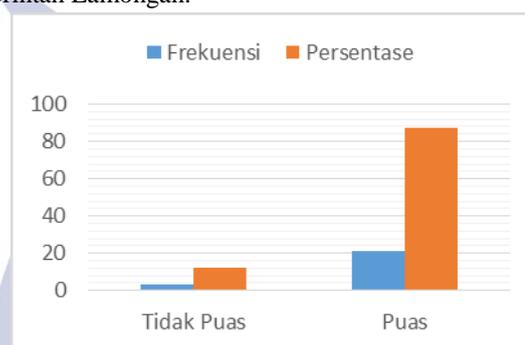
Berikut adalah hasil dari 24 responden dari masyarakat tunadaksa yang menjawab terkait indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa di Lamongan. Pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa terdapat 20 pernyataan, untuk mengukur fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa. Pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa kategori penentuan kelas interval terbagi menjadi dua (2) yaitu puas dan tidak puas. Dapat diketahui pada indikator ini nilai tertinggi adalah 20 sedangkan nilai terendah adalah 0. Jadi, panjang kelas interval pada indikator ini adalah 10 hasil dari kelas interval kemudian dikategorikan sehingga dapat diketahui jumlah masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang puas dan tidak puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan.

Kemudian data dipersentasekan untuk mempermudah dalam membaca data. Berikut penyajian data pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa :

Tabel 2 Fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa di Lamongan

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
0-10	Tidak Puas	3	12,5%
11-20	Puas	21	87,5%
Jumlah		24	100%

Berdasarkan table 2, maka dapat diketahui bahwa fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah yang meliputi fasilitas parkir khusus, ruang tunggu khusus, dan aksesibilitas pada bangunan umum dirasa sudah maksimal dan dapat dimanfaatkan/digunakan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lebih banyaknya responden yang mengatakan puas dari pada responden yang mengatakan tidak puas terhadap fasilitas yang telah diberikan pemerintah tersebut. Rata-rata perolehan skor pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa ini adalah 13,41. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang ada di Lamongan puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah Lamongan.



Grafik 1 Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa terhadap fasilitas publik di Lamongan

Kategori tidak puas menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa tidak memperoleh dampak positif dari fasilitas publik yang sudah ada. Sedangkan kategori puas menunjukkan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa memperoleh dampak positif dari fasilitas publik yang sudah ada.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang pertama yaitu fasilitas publik yang diberikan pemerintah memuaskan. Sebanyak 23 (95,83%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah memuaskan, dan sebanyak 1 (4,16%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kedua yaitu kinerja pemerintah dalam membangun fasilitas publik bagi penyandang disabilitas memuaskan. Sebanyak 20 (83,33%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa kinerja pemerintah dalam membangun fasilitas publik bagi disabilitas memuaskan, dan sebanyak 4 (16,66%) memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang ketiga yaitu pemerintah peduli terhadap penyandang disabilitas. Sebanyak 14 (58,33%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden

bahwa pemerintah peduli terhadap penyandang disabilitas, dan sebanyak 10 (41,66%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang keempat yaitu fasilitas publik yang diberikan pemerintah baik. Sebanyak 16 (66,66%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah baik, dan sebanyak 8 (33,33%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kelima yaitu fasilitas publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sebanyak 15 (62,5%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan sebanyak 9 (37,5%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang keenam yaitu sarana dan prasarana penunjang dalam fasilitas publik memuaskan. Sebanyak 15 (62,5%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa sarana dan prasarana penunjang dalam fasilitas publik memuaskan, dan sebanyak 9 (37,5%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang ketujuh yaitu fasilitas publik yang diberikan pemerintah mudah diakses. Sebanyak 18 (75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah mudah diakses, dan sebanyak 6 (25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kedelapan yaitu fasilitas publik yang diberikan pemerintah sangat nyaman digunakan. Sebanyak 18 (75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah sangat nyaman digunakan, dan sebanyak 6 (25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kesembilan yaitu fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebanyak 12 (50%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan, dan sebanyak 12 (50%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kesepuluh yaitu fasilitas publik yang tersedia membantu saya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebanyak 17 (70,83%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa fasilitas publik yang tersedia membantu saya dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari, dan sebanyak 7 (29,16%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kesebelas yaitu fasilitas publik yang disediakan pemerintah menjadikan saya mandiri. Sebanyak 15 (62,5%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa fasilitas publik yang disediakan pemerintah menjadikan saya mandiri, dan sebanyak 9 (37,5%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kedua belas yaitu mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas publik disediakan. Sebanyak 17 (70,33%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas publik yang disediakan, dan sebanyak 7 (29,16%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang ketiga belas yaitu dalam berbagai bentuk pelayanan publik selalu tersedia fasilitas publik yang baik. Sebanyak 14 (58,33%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa dalam berbagai bentuk pelayanan publik selalu tersedia fasilitas publik yang baik, dan sebanyak 10 (41,66%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang keempat belas yaitu fasilitas publik yang disediakan pemerintah sangat efektif dan mengutamakan kualitas serta kebutuhan. Sebanyak 18 (75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa fasilitas publik yang disediakan pemerintah sangat efektif dan mengutamakan kualitas serta kebutuhan, dan sebanyak 6 (25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kelima belas yaitu saya terbantu dengan fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan kekurangan saya. Sebanyak 16 (66,66%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa saya terbantu dengan fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan kekurangan saya, dan sebanyak 8 (33,33%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang keenam belas yaitu memperoleh keleluasaan dan kemudahan akses dalam beraktivitas. Sebanyak 20 (83,33%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa memperoleh keleluasaan dan kemudahan akses dalam beraktivitas, dan sebanyak 4 (16,66%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang ketujuh belas yaitu tersedianya akses khusus yang efektif pada gedung-gedung dan tempat-tempat umum. Sebanyak 16 (66,66%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa

tersedianya akses khusus yang efektif pada gedung-gedung dan tempat-tempat umum, dan sebanyak 8 (33,33%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kedelapan belas yaitu tersedianya akses atau jalan yang ramah bagi pengguna kursi roda pada fasilitas publik. Sebanyak 12 (50%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa tersedianya akses atau jalan yang ramah bagi pengguna kursi roda pada fasilitas publik, dan sebanyak 12 (50%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kesembilan belas yaitu memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Sebanyak 16 (66,66%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia, dan sebanyak 8 (33,33%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa yang kedua puluh yaitu semua gedung-gedung atau tempat-tempat umum menyediakan parker khusus bagi disabilitas. Sebanyak 10 (41,66%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari keseluruhan responden bahwa semua gedung-gedung atau tempat-tempat umum menyediakan parkir khusus bagi disabilitas, dan sebanyak 14 (58,33%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan Masyarakat Penyandang Disabilitas Tunanetra Atas Fasilitas Publik Yang Diberikan Kota Lamongan.

Indikator yang kedua dalam penelitian ini memiliki peranan yang penting karena digunakan untuk mengukur tanggapan masyarakat penyandang disabilitas khususnya pada indikator ini yaitu masyarakat penyandang disabilitas tunanetra. Menurut Reefani (2013:17) penyandang disabilitas tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau memiliki hambatan secara visual. Tunanetra dapat dkategorikan menjadi dua yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*. Sebagai masyarakat penyandang disabilitas tunanetra tentu membutuhkan adanya fasilitas publik yang dapat membantu mereka dalam menjalankan kehidupan atau aktivitas sehari-hari, fasilitas publik tersebut meliputi jalan pedestrian dengan lantai pemandu dan guiding block, tombol braille pada lift, serta aksesibilitas pada bangunan umum dan transportasi umum.

Berikut adalah hasil dari 16 responden dari masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang menjawab terkait indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra di Lamongan.

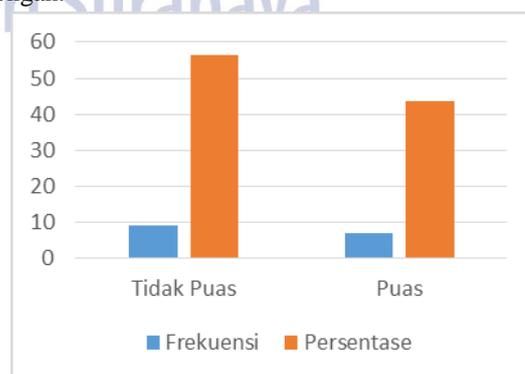
Pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra terdapat 20 pernyataan, untuk mengukur fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra. Kategori penentuan kelas interval terbagi menjadi dua (2) yaitu puas dan tidak puas. Dapat diketahui pada indikator ini nilai tertinggi yaitu 20 sedangkan nilai terendah yaitu 0. Jadi, panjang kelas interval pada indikator ini adalah 10 hasil dari kelas interval kemudian dikategorikan sehingga dapat diketahui jumlah masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang puas dan tidak puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan atau disediakan.

Kemudian dari data yang telah diperoleh selanjutnya dipersentasekan untuk mempermudah dalam membaca data. Berikut penyajian data pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra:

Tabel 3 Fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra di Lamongan

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
0-10	Tidak Puas	9	56,25%
11-20	Puas	7	43,75%
Jumlah		16	100%

Berdasarkan table 3, maka dapat diketahui bahwa fasilitas publik yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat penyandang disabilitas tunanetra tidak maksimal dan perlu adanya perbaikan, karena lebih banyak responden yang mengatakan tidak puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah yang meliputi fasilitas jalan pedestrian dengan lantai pemandu dan guiding block, tombol braille pada lift, serta aksesibilitas pada bangunan umum dan transportasi umum dari pada yang mengatakan puas terhadap fasilitas yang telah diberikan pemerintah tersebut. Rata-rata perolehan skor pada indikator ini yaitu 9,81, jadi dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang ada di Lamongan tidak puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah Lamongan.



Grafik 2

Tanggapan Masyarakat disabilitas Penyandang Tunanetra Terhadap Fasilitas Publik di Lamongan

Kategori tidak puas menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas tunanetra tidak memperoleh dampak positif atau merasa tidak memperoleh pelayanan yang baik melalui fasilitas publik yang tersedia. Sedangkan kategori puas menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas tunanetra memperoleh dampak positif dari tersedianya fasilitas publik yang ada atau merasa terlayani dengan baik melalui fasilitas publik yang telah tersedia.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang pertama yaitu fasilitas publik yang diberikan pemerintah memuaskan. Sebanyak 12 (75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah memuaskan, dan sebanyak 4 (25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kedua yaitu kinerja pemerintah dalam membangun fasilitas publik bagi penyandang disabilitas memuaskan. Sebanyak 11 (68,75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa kinerja pemerintah dalam membangun fasilitas publik bagi penyandang disabilitas memuaskan, dan sebanyak 5 (31,25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang ketiga yaitu pemerintah peduli terhadap penyandang disabilitas. Sebanyak 14 (87,5%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa pemerintah peduli terhadap penyandang disabilitas, dan sebanyak 2 (12,5%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang keempat yaitu fasilitas publik yang diberikan pemerintah baik. Sebanyak 4 (25%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah baik, dan sebanyak 12 (75%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kelima yaitu fasilitas publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sebanyak 2 (12,5%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan sebanyak 14 (87,5%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang keenam adalah sarana dan prasarana penunjang dalam fasilitas publik memuaskan. Sebanyak 6 (37,5%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa sarana dan prasarana penunjang dalam fasilitas publik memuaskan, dan sebanyak 10 (62,5%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang ketujuh adalah fasilitas publik yang diberikan pemerintah mudah diakses. Sebanyak 7 (43,75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah mudah diakses, dan sebanyak 9 (56,25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kedelapan adalah fasilitas publik yang diberikan pemerintah sangat nyaman digunakan. Sebanyak 6 (37,5%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah sangat nyaman digunakan, dan sebanyak 10 (62,5%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kesembilan adalah fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebanyak 7 (43,75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan, dan sebanyak 9 (56,25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kesepuluh adalah fasilitas publik yang tersedia membantu saya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebanyak 9 (56,25%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang tersedia membantu saya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan sebanyak 7 (43,75%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kesebelas adalah fasilitas publik yang disediakan pemerintah menjadikan saya mandiri. Sebanyak 11 (68,75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang disediakan pemerintah menjadikan saya mandiri, dan sebanyak 5 (31,25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kedua belas adalah mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas publik yang disediakan. Sebanyak 7 (43,5%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas publik yang disediakan, dan sebanyak 9 (56,25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang ketiga belas adalah dalam berbagai bentuk pelayanan publik selalu tersedia fasilitas publik yang baik. Sebanyak 5 (31,25%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa dalam berbagai bentuk pelayanan publik selalu tersedia fasilitas publik yang baik, dan sebanyak 11 (68,75%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang keempat belas adalah fasilitas

yang disediakan oleh pemerintah sangat efektif dan mengutamakan kualitas serta kebutuhan. Sebanyak 8 (50%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sangat efektif dan mengutamakan kualitas serta kebutuhan, dan sebanyak 8 (50%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kelima belas adalah saya terbantu dengan fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan kekurangan saya. Sebanyak 11 (68,75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa saya terbantu dengan fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan kekurangan saya, dan sebanyak 5 (31,25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang keenam belas adalah dengan adanya guiding block/ lantai pemandu sangat membantu dalam menjalankan aktivitas. Sebanyak 8 (50%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa dengan adanya guiding block atau lantai pemandu sangat membantu dalam menjalankan aktivitas, dan sebanyak 8 (50%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang ketujuh belas adalah kualitas guiding block atau lantai pemandu yang diberikan pemerintah baik. Sebanyak 8 (50%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa kualitas guiding block atau lantai pemandu yang diberikan pemerintah baik, dan sebanyak 8 (50%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kedelapan belas adalah memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan ketika menggunakan guiding block atau lantai pemandu. Sebanyak 8 (50%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan ketika menggunakan guiding block atau lantai pemandu, dan sebanyak 8 (50%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kesembilan belas adalah seluruh trotoar sudah dilengkapi dengan guiding block atau lantai pemandu yang baik. Sebanyak 11 (68,75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa seluruh trotoar sudah dilengkapi dengan guiding block atau lantai pemandu yang baik, dan sebanyak 5 (31,25%) responden memilih pilihan jawaban Tidak. Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang kedua puluh adalah bahan bacaan yang ada di perpustakaan ramah terhadap disabilitas. Sebanyak 2 (12,5%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa bahan bacaan yang ada di

perpustakaan ramah terhadap disabilitas, dan sebanyak 14 (87,5%) responden memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan Masyarakat Penyandang Disabilitas Tunawicara dan Cacat Ganda Atas Fasilitas Publik Yang Diberikan Kota Lamongan.

Indikator yang ketiga dalam penelitian ini memiliki peranan yang penting karena digunakan untuk mengukur tanggapan masyarakat disabilitas khususnya pada indikator ini yaitu masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda. Menurut Purwanto (1998) tunawicara yaitu seseorang yang mengalami kelainan secara pengucapan Bahasa maupun suaranya. Kemudian menurut Titus Andy (2015:373) Tunawicara merupakan kelainan baik secara pengucapan bahasa maupun suara yang menimbulkan kesulitan berkomunikasi secara lisan dalam suatu lingkungan. Sedangkan menurut Reefani (2013:17) penyandang cacat ganda atau tunaganda merupakan seseorang yang menyandang/memiliki lebih dari satu jenis kecacatan, misalkan tunawicara dan tunarunggu sekaligus. Sebagai masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan tunaganda (dalam penelitian ini tunawicara dan runngu) tentu membutuhkan fasilitas publik untuk membantu dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, fasilitas publik tersebut meliputi penyediaan audio visual dan penerjemah untuk membantu dalam berkomunikasi.

Berikut adalah hasil dari 29 responden dari masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang menjawab terkait indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda di Lamongan.

Pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan cacat ganda terdapat 20 pernyataan, untuk mengukur fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda. Pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda kategori penentuan kelas interval terbagi menjadi dua (2) yaitu puas dan tidak puas.

Dapat diketahui nilai tertinggi pada indikator ini adalah 20 sedangkan nilai terendah pada indikator ini adalah 0. Jadi, panjang kelas interval pada indikator ini adalah 10 hasil dari kelas interval kemudian dikategorikan sehingga dapat diketahui jumlah masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang puas dan yang tidak puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan atau disediakan pemerintah Lamongan.

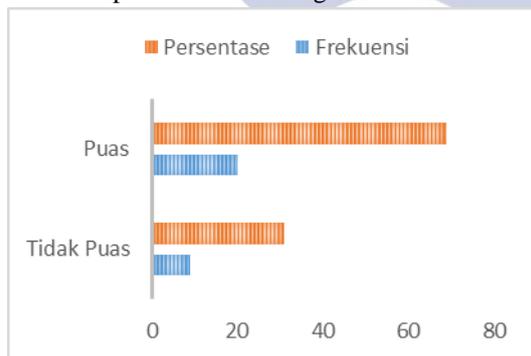
Kemudian dari data yang telah diperoleh, selanjutnya dipersentasikan untuk mempermudah dalam membaca data. Berikut penyajian data pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda:

Tabel 4 Fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda di Lamongan

Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
0-10	Tidak Puas	9	31,03%
11-20	Puas	20	68,96%
Jumlah		29	100%

Berdasarkan tabel 4, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Lamongan telah menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang meliputi fasilitas audio visual dan penerjemah untuk membantu dalam berkomunikasi dengan sangat baik dan dapat digunakan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel 4 bahwa lebih banyak masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang mengatakan puas dari pada masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang mengatakan tidak puas.

Rata-rata perolehan skor pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda adalah 12,86. Jadi, berdasarkan data pada table 4 diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda, para masyarakat disabilitas penyandang tunawicara dan penyandang cacat ganda yang ada di Lamongan merasa puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan atau disediakan pemerintah Lamongan.



Grafik 3 Tanggapan Masyarakat Penyandang Disabilitas Tunawicara dan Penyandang cacat ganda terhadap fasilitas publik di Lamongan

Kategori tidak puas menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda tidak memperoleh dampak positif atau mereka merasa tidak memperoleh pelayanan yang baik melalui fasilitas publik yang telah disediakan dan diberikan oleh pemerintah Lamongan. Sedangkan pada kategori puas menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memperoleh

dampak positif dari adanya fasilitas publik yang ada atau mereka merasa terlayani dengan baik melalui fasilitas publik yang telah disediakan dan diberikan pemerintah Lamongan.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang pertama adalah fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah memuaskan. Sebanyak 23 (79,31%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang telah diberikan oleh pemerintah memuaskan, dan sebanyak 6 (20,68%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kedua adalah kinerja pemerintah dalam membangun fasilitas publik bagi penyandang disabilitas memuaskan. Sebanyak 23 atau (79,31%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa kinerja pemerintah dalam membangun fasilitas publik bagi penyandang disabilitas memuaskan, dan sebanyak 6 atau (20,68%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang ketiga adalah pemerintah peduli terhadap penyandang disabilitas. Sebanyak 25 atau (86,20%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa pemerintah peduli terhadap penyandang disabilitas, dan sebanyak 4 atau (13,79%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang keempat adalah fasilitas publik yang diberikan pemerintah baik. Sebanyak 14 atau (48,27%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah baik, dan sebanyak 15 atau (51,72%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kelima adalah fasilitas publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sebanyak 12 atau (41,37%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan sebanyak 17 atau (58,62%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang keenam adalah sarana dan prasarana penunjang fasilitas publik memuaskan. Sebanyak 15 atau (51,72%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa sarana dan prasarana penunjang dalam fasilitas publik memuaskan, dan sebanyak 14 atau (48,27%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang ketujuh adalah fasilitas publik yang diberikan pemerintah mudah diakses. Sebanyak 21 atau (72,41%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah mudah diakses, dan sebanyak 8 atau (27,58%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kedelapan adalah fasilitas publik yang diberikan pemerintah sangat nyaman digunakan. Sebanyak 25 atau (86,20%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang diberikan pemerintah sangat nyaman digunakan, dan sebanyak 4 atau (13,79%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kesembilan adalah fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebanyak 17 atau (58,62%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan, dan sebanyak 12 atau (41,37%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kesepuluh adalah fasilitas publik yang tersedia membantu saya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebanyak 24 atau (82,75%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang tersedia membantu saya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan sebanyak 5 atau (17,24%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kesebelas adalah fasilitas publik yang disediakan pemerintah menjadikan saya mandiri. Sebanyak 17 atau (58,62%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang disediakan

pemerintah menjadikan saya mandiri, dan sebanyak 12 atau (41,37%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kedua belas adalah mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas publik yang disediakan. Sebanyak 18 atau (62,06%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas publik yang disediakan, dan sebanyak 11 atau (37,93%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang ketiga belas adalah dalam berbagai bentuk pelayanan publik selalu tersedia fasilitas publik yang baik. Sebanyak 10 atau (34,48%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa dalam berbagai bentuk pelayanan publik selalu tersedia fasilitas publik yang baik, dan sebanyak 19 atau (65,51%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang keempat belas adalah fasilitas publik yang disediakan pemerintah sangat efektif dan mengutamakan kualitas serta kebutuhan. Sebanyak 19 atau (65,51%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah sangat efektif dan mengutamakan kualitas serta kebutuhan, dan sebanyak 10 atau (34,48%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat disabilitas penyandang tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kelima belas adalah saya terbantu dengan fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan kekurangan saya. Sebanyak 20 atau (68,96%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa saya terbantu dengan fasilitas publik yang tersedia sesuai dengan kekurangan saya, dan sebanyak 9 atau (31,03%) responden penyandang tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang keenam belas adalah memperoleh kemudahan dalam menerima informasi melalui audio visual. Sebanyak 21 atau (72,41%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa memperoleh kemudahan dalam menerima informasi melalui audio visual, dan sebanyak 8 atau (27,58%) responden penyandang disabilitas

tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang ketujuh belas adalah semua lembaga pelayanan publik dilengkapi dengan fasilitas audio visual. Sebanyak 11 atau (37,93%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa semua lembaga pelayanan publik dilengkapi dengan fasilitas audio visual, dan sebanyak 18 atau (62,06%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kedelapan belas adalah kualitas fasilitas audio visual yang tersedia sangat baik. Sebanyak 17 atau (58,62%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa kualitas fasilitas audio visual yang tersedia sangat baik, dan sebanyak 12 atau (41,37%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kesembilan belas adalah tersedianya fasilitas audio visual membantu dalam menerima pelayanan dengan baik. Sebanyak 20 atau (68,96%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa tersedianya fasilitas audio visual membantu dalam menerima pelayanan dengan baik, dan sebanyak 9 atau (31,03%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda yang kedua puluh adalah pemerintah menyediakan penerjemah pada lembaga pelayanan publik untuk membantu dalam berkomunikasi. Sebanyak 21 atau (72,41%) responden memilih pilihan jawaban Ya dari seluruh responden bahwa pemerintah menyediakan penerjemah pada lembaga pelayanan publik untuk membantu dalam berkomunikasi, dan sebanyak 8 atau (27,58%) responden penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda memilih pilihan jawaban Tidak.

Tahap selanjutnya untuk melihat tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang telah diberikan kota Lamongan

Dihitung dengan tiga indikator yang telah dijabarkan yaitu fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa, fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra, dan fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda. Dalam penelitian ini dilakukan pengkategorian melalui jumlah nilai yang diperoleh responden kemudian

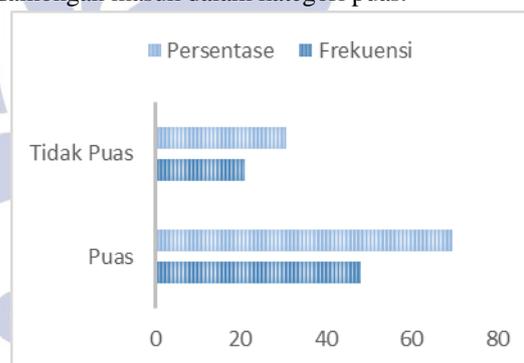
dipresentase menggunakan rumus yang telah disiapkan. Berikut merupakan penyajian data dalam bentuk tabel:

Tabel 5 Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang diberikan kota Lamongan

Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
0-10	Tidak Puas	21	30,43%
11-20	Puas	48	69,56%
Jumlah		69	100%

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 5, maka dapat diketahui bahwa lebih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Lamongan merasa puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah. Artinya, fasilitas publik yang telah dibangun oleh pemerintah Lamongan sudah maksimal dan dapat dimanfaatkan/digunakan dengan baik bagi masyarakat penyandang disabilitas. Dapat diketahui perolehan jumlah skor tertinggi responden adalah 20 sedangkan perolehan jumlah skor terendah responden adalah 0. Jumlah perolehan skor pengumpulan data seluruh responden dari ketiga indikator masyarakat penyandang disabilitas adalah 852 dengan rata-rata perolehan skor adalah 12,34.

Berdasarkan perolehan rata-rata skor tersebut maka dapat diketahui bahwa masyarakat penyandang disabilitas di Lamongan masuk dalam kategori puas.



Grafik 4 Tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang diberikan kota Lamongan

Berdasarkan grafik 4 terkait tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang diberikan kota Lamongan dari data yang telah diolah dari tiga indikator yaitu fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa, fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra, dan fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda. Maka, dapat disimpulkan bahwa responden yang masuk pada kategori 'Puas' memiliki perolehan tertinggi, sedangkan responden yang masuk pada kategori 'Tidak puas' memiliki perolehan rendah.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendikripsikan tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang diberikan kota Lamongan. Tanggapan merupakan suatu hasil atau kesan yang diperoleh dari pengamatan subyek terhadap suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada tanggapan masyarakat penyandang disabilitas dari masing-masing jenis disabilitas antara lain penyandang tunadaksa, penyandang tunanetra, serta penyandang tunawicara dan penyandang cacat ganda.

Berdasarkan pada tabel 5 dapat diketahui bahwa 48 dari 69 atau (69,56%) masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Lamongan masuk pada kategori puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah. Dan sebanyak 21 dari 69 atau (30,43%) masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Lamongan masuk pada kategori tidak puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah, data yang telah diolah tersebut memuat dari ketiga indikator yaitu fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa, fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra dan fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan cacat ganda.

Pada penelitian ini, menggunakan teori tugas pemerintah menurut Rasyid (2000) dalam Suprianto (2014:3), dimana menurut Rasyid tugas pemerintah ada tujuh (7) yaitu yang *pertama*, menjamin suatu keamanan dalam negara dari kemungkinan serangan dari luar, serta menjamin keamanan agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara-cara kekerasan. *Kedua*, memelihara ketertiban agar tidak terjadi kerusuhan antar warga masyarakat, serta menjamin agar segala bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada semua warga masyarakat tanpa membedakan status yang melatar belakang mereka. *Keempat*, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan pada bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah. *Kelima*, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membantu orang miskin, memelihara orang cacat, jompo, dan anak terlantar serta menampung dan menyalurkan para gelandangan ke sektor yang membuat mereka produktif atau semacamnya.

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang dapat menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong agar terciptanya lapangan pekerjaan baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan-kebijakan lain yang dapat

secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. *Ketujuh*, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, hutan, dan tanah.

Dari ketujuh poin tugas pemerintah yang telah dikemukakan oleh Rasyid, poin keempat yang sangat relevan digunakan acuan untuk membahas data dalam penelitian ini yaitu pemerintah memiliki kewajiban melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah. Maka, apabila melihat data yang telah disajikan pada tabel 5 maka dapat dikatakan bahwa pemerintah lamongan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga-lembaga wakil rakyat dengan memberikan pelayanan yang baik salah satunya dengan memberikan fasilitas publik yang baik kepada masyarakat khususnya dalam hal ini kepada masyarakat disabilitas.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa 48 dari 69 atau (69,56%) responden masyarakat penyandang disabilitas yang ada di lamongan masuk pada kategori puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah. Sedangkan sisanya yakni 21 dari 69 atau (30,43%) responden masyarakat penyandang disabilitas di Lamongan merasa tidak puas atau masuk pada kategori tidak puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat penyandang disabilitas yang puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah memperoleh perolehan skor yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat penyandang dsabilitas yang tidak puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah. Artinya, pemerintah Lamongan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat penyandang disabilitas di Lamongan.

Tabel 6 Perbandingan tiap indikator

Indikator	Puas	Tidak puas	Rata-Rata
Fasilitas publik bagi masyarakat disabilitas penyandang tunadaksa	87,5%	12,5%	Puas
Fasilitas publik bagi masyarakat disabilitas penyandang tunanetra	43,75%	56,25%	Tidak puas
Fasilitas publik bagi masyarakat disabilitas penyandang tunawicara dan penyandang cacat ganda	68,96%	31,03%	Puas

Berdasarkan tabel 6, apabila lebih diperinci pada setiap indikator terdapat salah satu indikator yang masuk pada

kategori tidak puas atau memiliki jumlah rata-rata yang rendah yaitu pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra. Pada indikator tersebut tingkat ketidakpuasan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra terhadap fasilitas publik yang telah diberikan kota Lamongan lebih tinggi yaitu 56,25% dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat penyandang disabilitas tunanetra yang hanya 43,75%.

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun secara umum pemerintah Lamongan dalam memberikan pelayanan melalui pengadaan fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas sudah baik, bukan berarti pemerintah Lamongan tidak memiliki pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dan diselesaikan. Apabila melihat data tersebut maka pemerintah Lamongan memiliki tugas untuk segera memperbaiki fasilitas publik yang diperuntukan bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra sesuai dengan yang dibutuhkan.

Dari hasil penelitian ini, dari perbandingan ketiga indikator tersebut yang memiliki presentase yang cukup tinggi dari pada yang lainnya yaitu fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa. Dalam hal ini, masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa menjadi masyarakat yang memperoleh dampak positif paling tinggi dari adanya fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah sehingga mereka merasa sangat terbantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan merasa terlayani dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pengumpulan data yang telah diperoleh dari responden yang kemudian dianalisis dan dipresentasikan maka diperoleh kesimpulan bahwa 48 dari 69 atau (69,56%) masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Lamongan masuk dalam kategori 'puas' terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah Lamongan. Sedangkan sisanya yaitu 21 dari 69 atau (30,43%) masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Lamongan masuk dalam kategori 'tidak puas' terhadap fasilitas publik yang telah diberikan pemerintah Lamongan.

Perolehan jumlah skor tertinggi responden adalah 20 sedangkan perolehan skor terendah responden adalah 0. Perolehan jumlah skor pengumpulan data dari seluruh responden pada ketiga indikator tanggapan masyarakat penyandang disabilitas adalah 852 dengan rata-rata perolehan skor yaitu sebesar 12,34. Berdasarkan perolehan rata-rata skor tersebut maka tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang telah diberikan kota Lamongan, responden masuk dalam kategori 'puas'.

Pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunadaksa menunjukkan bahwa responden cenderung puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan kota Lamongan dengan nilai presentase 87,5%. Kemudian pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang cacat ganda menunjukkan bahwa responden juga cenderung puas dengan nilai presentase 68,96%. Sedangkan pada indikator fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra menunjukkan bahwa responden cenderung tidak puas terhadap fasilitas publik yang telah diberikan kota Lamongan dengan nilai presentase 56,25%.

Berdasarkan teori tugas pemerintah, data terkait tanggapan masyarakat penyandang disabilitas atas fasilitas publik yang telah diberikan kota Lamongan yang telah diperoleh menunjukkan bahwa pemerintah Lamongan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat disabilitas yang ada di Lamongan melalui pengadaan fasilitas publik yang baik dan mudah diakses oleh para penyandang disabilitas. Namun terdapat beberapa fasilitas publik yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan aksesibilitasnya khususnya pada sektor fasilitas publik bagi masyarakat penyandang disabilitas tunanetra.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah untuk terus memperhatikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas salah satunya dengan memberikan pelayanan yang baik melalui pengadaan fasilitas publik yang mudah digunakan, dimanfaatkan, dan tentunya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas. Karena para penyandang disabilitas dimata hukum sama seperti masyarakat normal yang lainnya dan dalam beberapa peraturan-peraturan yang ada juga sudah diatur dengan tegas mengenai pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Argyo, Demartoto. 2005. *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: UNS Press.hlm 10
- Atep Adya Bharata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Yudhistira.hlm 11.
- Cahyani, D. Purwaningsih. 2015. Pengaruh fasilitas perpustakaan dan pelayanan perpustakaan terhadap minat membaca siswa kelas XI di perpustakaan smk n 1 kendal. Fakultas ekonomi. Universitas negeri semarang. Hal 18
- Cohen, Sheldon & Syme, S. Leonard. 1985. *Social Support and Health*. Florida : Academic Press.

- Fanny Priscyllia. *Lex Crimen*. Volume 5 Nomor 3 Maret 2016. Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.
- Heri, Purwanto. 1998. *Ortopedagogik Umum. Pendidikan Luar Biasa*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- <https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2018/02/08/971/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-lamongan-2016.html> (diakses tanggal 20 November 2019)
- <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfe=NjNkYWE0NzEwOTJiYjJjYjdjMWZhZGE2&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1Ym xpY2F0aW9uLzIwMTYvMTEvMzAvNjNkYWE0N zEwOTJiYjJjYjdjMWZhZGE2L3Byb2ZpbC1wZW5 kdWR1ay1pbmRybmVzaWEtaGFzaWwte3VwYXMt MjAxNS0dG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wNS0 yOCAxNDowMzoyMw%3D%3D> (diakses pada 25 Mei 2020)
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hlm 34.
- Litjan Poltak Sinabella,dkk. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.hlm 5.
- M. Syafi'ie. 2014. *Jurnal INKLUSI*. Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember 2014. Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.
- Marwandianto. *Jurnal HAM*. Volume 9 Nomor 2 Desember 2018. Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif HAM.
- Masyhuri dan Zainuddin,M. (2008). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, R. Alfaris. 2018. Widya Yuridika Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 2 desember 2018. Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan.
- Ni luh, P. Puspitasari, I Komang Gede Bendesa. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Volume 5 nomor 1 Tahun 2016. Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung.
- Nur, K. Reefani. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.hlm 17
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Uapaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Pujianti. 2018. *Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Difabel Di Kota Pangkalpinang*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Raminto, dan Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Rita, Yuningsih. *E Jurnal Katalogis*. Volume 4 Nomor 8 Agustus 2016. Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Di Kota Palu.
- Sugi Rahayu dan Dewi Utami. 2014. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*. Volume 1 Nomor 1 Desember 2013. Pelayanan Publik Bagi Pemeuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta.
- Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita, Ahdiyana. 2013. *SOCIA*. Volume 10. No. 2 September 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah istimewa Yogyakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.hlm 8
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfa Beta.hlm 117
- Suprianto. 2014. *Jom FISIP*. Volume 1 No. 2- Oktober 2014. Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Di Kabupaten Kampar).
- Titus A.K.,dkk. 2015. *J Ked Gi*. Volume 6 No. 4 Oktober 2015. Pengaruh Pemakaian Lip Bumper Terhadap Aktivitas Otot Bibir Pada Anak Tunawicara Usia 7-15 Tahun (Kajian di SLB Negeri Bantul Selama 4 Minggu).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik